

Laporan Keuangan Audited TA 2025

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Kekearifan Kesehatan Denpasar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kekearifan Kesehatan Denpasar Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menilai akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Kekearifan Kesehatan Denpasar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, April 2026



Hery Saputra, SKM., M.Kes
NIP. 196905041992031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	1
RINGKASAN LAPORAN	2
LAPORAN KEUANGAN	8
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
II. NERACA	9
III. LAPORAN OPERASIONAL	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. <i>Penjelasan Umum</i>	12
B. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran</i>	31
C. <i>Penjelasan atas Pos-pos Neraca</i>	44
D. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional</i>	58
E. <i>Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas</i>	68
F. <i>Pengungkapan-pengungkapan Lainnya</i>	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 dan 2024	3
Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	3
Tabel 3 Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024	4
Tabel 4 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024	5
Tabel 5 Total Anggaran Belanja per-Satker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar TA 2024 dan TA 2024	6
Tabel 6 Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang	21
Tabel 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	24
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	25
Tabel 9 Kertas Kerja Capaian Output Satker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar	28
Tabel 10 Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas	29
Tabel 11 Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Terakhir	31
Tabel 12 Anggaran berdasarkan Program TA 2024	32
Tabel 13 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024	33
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 15 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja	35
Tabel 16 Rincian Belanja Berdasarkan Program / Kegiatan TA 2024	37
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 19 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	40
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel 23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 24 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel 25 Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	45
Tabel 26 Posisi Piutang Bukan Pajak Yang Telah Diserahkan ke DJKN Per 31 Desember 2025	45
Tabel 27 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel 28 Perbandingan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	48
Tabel 29 Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 30 Mutasi Tanah	50
Tabel 31 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	51
Tabel 32 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	52
Tabel 33 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	53
Tabel 34 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	54

Tabel 35 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025	55
Tabel 36 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	56
Tabel 37 Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel 39 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel 40 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel 41 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel 42 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel 43 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	66
Tabel 44 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	65
Tabel 45 Rincian Transaksi Antar Entitas	67
Tabel 46 Transfer Masuk per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	68
Tabel 47 Transfer Keluar per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja TA 2025	36
Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca Percobaan AkruaI Kas	L-01
Lampiran 2	Neraca Percobaan AkruaI (Saldo Awal)	L-02
Lampiran 3	Neraca Percobaan AkruaI	L-03
Lampiran 4	Neraca	L-04
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran	L-05
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	L-06
Lampiran 7	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Akun	L-07
Lampiran 8	Laporan Realisasi Anggaran Sumber Dana Kegiatan Output	L-08
Lampiran 9	Laporan Operasional	L-09
Lampiran 10	Laporan Perubahan Ekuitas	L-10
Lampiran 11	Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca	L-11
Lampiran 12	Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel	L-12
Lampiran 13	Laporan Barang Pengguna Ekstrakomptabel	L-13
Lampiran 14	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel)	L-14
Lampiran 15	Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Ekstrakomptabel)	L-15
Lampiran 16	Laporan Neraca Persediaan	L-16
Lampiran 17	Laporan Mutasi Persediaan	L-17
Lampiran 18	Berita Acara Opname Fisik	L-18
Lampiran 19	Daftar Transfer Masuk/transfer Keluar	L-19
Lampiran 20	Transaksi Resiprokal	L-20
Lampiran 21	Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar nomor HK.02.03/I/5749/2024 tentang UAPPA/B Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar TA 2025	L-21

DAFTAR SINGKATAN

AA	: <i>Automatic Adjustment</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBKK	: Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
BMN	: Barang Milik Negara
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
Caput	: Capaian Output
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
DDEL	: Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKEL	: Ditagihkan Kepada Entitas Lain
JIJ	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KD	: Kantor Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KP	: Kantor Pusat
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayanaan Negara dan Lelang
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
Litbangkes	: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan

PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RI	: Republik Indonesia
Satker	: Satuan Kerja
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SSGI	: Studi Status Gizi Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
THR	: Tunjangan Hari Raya
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UAPPA/B-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1
UP	: Uang Persediaan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, April 2026
Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Denpasar,



Hery Saputra, SKM., M.Kes
NIP. 196905041992031009

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara ringkas Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Periode 31 Desember TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.157.980.224,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.157.980.224,00 atau mencapai 116,65 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.850.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 22.517.534.316,00 atau mencapai 88,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 25.538.163.000,00. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025			31 Des 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	1.850.000.000	2.157.980.224	116,65	2.169.683.229
PNBP	1.850.000.000	2.157.980.224	116,65	2.169.683.229
Belanja Negara	25.538.163.000	22.517.534.316	88,17	25.636.440.251
51 Belanja Pegawai	17.118.655.000	16.993.813.070	99,27	16.882.602.962
52 Belanja Barang	8.336.218.000	5.440.505.946	65,26	8.148.066.039
53 Belanja Modal	83.290.000	83.215.300	99,91	605.771.250

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 66.205.536.729,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 469.001.791,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp65.736.534.938,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 44.959.784,00 dan Rp 66.160.576.945,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp.)	%
Aset				
Aset Lancar	469.001.791	739.849.638	-270.847.847	-36,61
Aset Tetap	65.690.816.188	67.824.156.776	-2.133.340.588	-3,15
Aset Lainnya	45.718.750	190.235.062	-144.516.312	-75,97
Jumlah Aset	66.205.536.729	68.754.241.476	-2.548.704.747	-3,71
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	44.959.784	1.216.000	43.743.784	3.597,35
Ekuitas				
Ekuitas	66.160.576.945	68.753.025.476	-2.592.448.531	-3,77
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	66.205.536.729	68.754.241.476	-2.548.704.747	-3,71

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.152.760.000,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 25.569.956.293,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (23.417.196.293,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp5.220.224,00 dan Rp 0 sehingga entitas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar mengalami Defisit-LO sebesar Rp (23.411.976.069,00).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp.)	%
Pendapatan				
PNBP	2.152.760.000	1.949.530.002	203.229.998	10,42
Jumlah Pendapatan	2.152.760.000	1.949.530.002	203.229.998	10,42
Beban				
Beban Operasional	25.569.956.293	29.306.266.856	-3.736.310.563	-12,75
Jumlah Beban	25.569.956.293	29.306.266.856	-3.736.310.563	-12,75
Defisit Kegiatan Operasional	-23.417.196.293	-27.356.736.854	3.939.540.561	-14,40
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	5.220.224	167.387.379	-162.167.155	-96,88
Defisit-LO	-23.411.976.069	-27.189.349.475	3.777.373.406	-13,89

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 68.753.025.476,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(23.411.976.069,00); kemudian dikurangi Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp(189.735.062,00); kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 21.009.262.600,00 sehingga Ekuitas entitas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 66.160.576.945,00

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Periode yg Berakhir sampai dengan		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2025	31 Des 2024	(Rp.)	%
Ekuitas Awal	68.753.025.476	70.945.707.769	-2.192.682.293	-3,09
Defisit LO	-23.411.976.069	-27.189.349.475	3.777.373.406	-13,89
Koreksi Yang Menambah/mengurangi Ekuitas	-189.735.062	0	-189.735.062	100,00
Transaksi Antar Entitas	21.009.262.600	24.996.667.182	-3.987.404.582	-15,95
Ekuitas Akhir	66.160.576.945	68.753.025.476	-2.592.448.531	-3,77

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Informasi penting terkait pelaksanaan anggaran:

- a. Satker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar TA 2025 sesuai DIPA yang terbit memiliki pagu anggaran belanja sebesar Rp.25.538.163.000,00
- b. Jumlah DIPA dengan rincian sesuai jenis kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN Denpasar (037)
- c. Sesuai dengan PERMENKES 10 Tahun 2024 menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2025 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar berubah nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar

Berikut ini total anggaran belanja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar:

Tabel 5
Total Anggaran Belanja per-Satker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Denpasar TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja	TA 2025	TA 2024	%
1	Belanja Pegawai	17.118.655.000	17.509.136.000	(2,28)
2	Belanja Barang	8.336.218.000	8.283.891.000	0,63
3	Belanja Modal	83.290.000	608.160.000	(630,17)
Jumlah Anggaran		25.538.163.000	26.401.187.000	(3,38)

Informasi penting terkait penyusunan Laporan Keuangan Audited TA 2025:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang menggunakan aplikasi SAKTI;
- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2007/2022 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar;
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan tingkat Eselon 1 dilakukan reviu oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI).
- d. Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) melalui aplikasi MONSAKTI.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Denpasar
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.850.000.000	2.157.980.224	116,65	1.172.500.000	2.169.683.229	185,05
JUMLAH PENDAPATAN		1.850.000.000	2.157.980.224	116,65	1.172.500.000	2.169.683.229	185,05
BELANJA							
Belanja Pegawai	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	17.118.655.000	16.993.813.070	99,27	17.509.136.000	16.882.602.962	96,42
Belanja Barang	B.4	8.336.218.000	5.440.505.946	65,26	8.283.891.000	8.148.066.039	98,36
Belanja Modal	B.5	83.290.000	83.215.300	99,91	608.160.000	605.771.250	99,61
JUMLAH BELANJA		25.538.163.000	22.517.534.316	88,17	26.401.187.000	25.636.440.251	97,10

Denpasar, 30 April 2026

Kepala Balai Besar Kekejarantinaan
Kesehatan Denpasar,Heri Saputra, SKM., M. Kes
NIP. 196905041992031009

II. NERACA

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 DES 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	425.450.199	425.450.199
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang	C.1.3	(425.450.199)	(425.450.199)
Bukan Pajak	C.1.4	469.001.791	739.849.638
Persediaan		469.001.791	739.849.638
Jumlah Aset Lancar			
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	41.278.131.000	41.278.131.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	29.199.016.984	33.428.431.309
Gedung dan Bangunan	C.2.3	25.369.009.295	25.369.009.295
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(30.155.341.091)	(32.251.414.828)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.2.5	-	-
Jumlah Aset Tetap		65.690.816.188	67.824.156.776
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	-	-
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.3.2	-	-
Aset Lain-Lain	C.3.3	4.490.129.625	10.616.417.083
Akum. Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(4.444.410.875)	(10.426.182.021)
Jumlah Aset Lainnya		45.718.750	190.235.062
JUMLAH ASET		66.205.536.729	68.754.241.476
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	44.959.784	1.216.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.4.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		44.959.784	1.216.000
JUMLAH KEWAJIBAN		44.959.784	1.216.000
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	66.160.576.945	68.753.025.476
JUMLAH EKUITAS		66.160.576.945	68.753.025.476
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		66.205.536.729	68.754.241.476

Denpasar, 30 April 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Denpasar,Heri Saputra, SKM., M.Kes
NIP. 196905041992031009

III. LAPORAN OPERASIONAL

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	31 Desember 2025	31 DES 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.152.760.000	1.949.530.002
JUMLAH PENDAPATAN		2.152.760.000	1.949.530.002
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	17.038.170.070	16.817.333.962
Beban Persediaan	D.3	1.245.975.793	1.305.715.155
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.303.995.663	4.424.504.404
Beban Pemeliharaan	D.5	1.010.910.156	1.583.382.844
Beban Perjalanan Dinas	D.6	804.567.473	1.736.974.866
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masy	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.166.337.138	3.370.090.625
JUMLAH BEBAN		25.569.956.293	29.238.001.856
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.417.196.293)	(27.288.471.854)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar		-	91.720.314
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	91.720.314
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus (Defisit) Keg. Non Operasional Lainnya		5.220.224	75.667.065
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.220.224	75.667.065
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEG NON OPERASIONAL	D.10	5.220.224	167.387.379
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(23.411.976.069)	(27.121.084.475)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(23.411.976.069)	(27.121.084.475)

Denpasar, 30 April 2026
 Kepala Balai Besar Kekarantinaan
 Kesehatan Denpasar,

 Hery Saputra, SKM., M.Kes
 NIP. 196905041992031009



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	68.753.025.476	70.945.707.769
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.411.976.069)	(27.189.349.475)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(189.735.062)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	500.000	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	(190.235.062)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	21.009.262.600	24.996.667.182
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS		(2.592.448.531)	(2.192.682.293)
EKUITAS AKHIR	E.7	66.160.576.945	68.753.025.476

Denpasar, 30 April 2026

Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Denpasar,

Her Saputra, SKM., M.Kes

NIP. 196905041992031009

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

*Dasar
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.5/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan keuangan Kementerian Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

81/KMK.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
22. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
23. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL Audited Tahun 2025.

*Profil dan
Kebijakan
Strategis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara dan pos lintas batas darat negara. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar (BBKK Denpasar)

merupakan salah satu dari 51 Balai Kekarantinaan yang ada di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Bali.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan Kementerian/ Lembaga sehingga pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;

8. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP, Modul Aset dan Modul Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Kebijakan Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000; (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.5/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 8

Pengolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4

Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Batas Wilayah Administrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik Lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Dasar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya berat	12
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	20
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produsen Fonogram	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	50
	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung yang kemudian disesuaikan apabila ada pemenuhan kewajiban, baik sebagian maupun keseluruhan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian

Output Satker

A.6. Capaian Output Satker

Sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2025, kertas kerja capaian output pada satker Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Kertas Kerja Capaian Output Satker
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar

No	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			% Data Masuk
				Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	
1	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Denpasar	4	31	31	0	31	100

A.7. Capaian Output Program Prioritas Nasional

*Capaian
Output
Program
Prioritas
Nasional*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Program Prioritas Nasional memiliki pagu sebesar Rp 2.908.160.000,00 dan realisasi sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.443.296.738,00 atau sebesar 49,62. Kecilnya realisasi anggaran tahun 2025 terjadi karena adanya efisiensi anggaran terpusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dari anggaran sebesar Rp 2.908.160.000,00 yang dapat digunakan oleh satker hanya sebesar Rp 1.444.579.000,00 sehingga persentase realisasi sesuai pagu efektif adalah sebesar Rp 1.443.296.738,00 atau sebesar 99,99 persen

BBKK Denpasar memiliki tujuan strategi yaitu terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah. BBKK Denpasar program prioritas nasional yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Pengendalian faktor risiko penyakit Pelabuhan dan Bandara
2. Sosialisasi dan Diseminasi
3. Layanan Pengendalian Lingkungan
4. Layanan faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS

5. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria, PES, DBD
6. Layanan Pengendalian faktor risiko penyakit DBD, Diare
7. Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan
8. Pelatihan kesehatan

Rincian kertas kerja capaian output di Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Kertas Kerja Capaian Output Kegiatan Prioritas
Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar

No	Satker	Unit Pelaksana	RO	Anggaran			Output		
				Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian	Progres (%)
1	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Koordinasi Pelayanan Kekarantina di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS-29)	112.714.000,00	18.330.000,00	16,31%	9	9	100%
2	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Sosialisasi dan Diseminasi (HS-29)	15.310.000,00	0,00	0%	300	300	100%
3	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas (HS-29)	115.960.000,00	86.710.000,00	74,78%	3.980	3980	100%
4	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pengendalian Faktor Risiko (lingkungan) (HS-29)	183.700.000,00	107.881.000,00	58,73%	13	13	100%
5	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (HS-29)	49.180.000,00	13.680.000,00	27,82%	41	41	100%
6	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan (HS-29)	316.800.000,00	117.480.000,00	37,08%	480	480	100%
7	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara (HS-29)	438.240.000,00	145.808.000,00	33,29%	498	498	100%
8	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus (HS-29)	342.400.000,00	249.288.000,00	80,24%	214	214	100%
9	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD (HS-29)	79.690.000,00	26.700.000,00	35,31%	65	65	100%
10	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes (HS-29)	131.895.000,00	41.440.000,00	31,58%	45	45	100%
11	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS-29)	14.460.000,00	6.210.000,00	46,21%	30	30	100%
12	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS-29)	151.200.000,00	75.600.000,00	50%	420	420	100%
13	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS-29)	34.400.000,00	17.200.000,00	50%	20	20	100%
14	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS-29)	31.800.000,00	13.114.000,00	41,37%	60	60	100%
15	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS-29)	13.140.000,00	11.440.000,00	87,06%	10	10	100%
16	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS-29)	76.370.000,00	26.950.000,00	35,29%	14	14	100%
17	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS-29)	162.360.000,00	58.080.000,00	35,77%	246	246	100%
18	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS-29)	15.520.000,00	8.720.000,00	56,19%	16	16	100%
19	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantina Kesehatan di Pintu Masuk (HS-29)	623.021.000,00	418.665.738,00	63,32%	30	30	100%
20	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan BMN	37.220.000,00	0,00	0%	11	11	100%
21	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5.012.000,00	4.470.720,00	95,75%	3	3	100%
22	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Umum	231.792.000,00	181.238.043,00	78,07%	17	17	100%
23	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Data dan Informasi	600.000,00	0,00	0%	1	1	100%
24	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Perkantoran	23.562.487.000,00	20.868.476.816,00	95,02%	12	12	100%
25	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Manajemen SDM	14.471.000,00	0,00	0%	2	2	100%
26	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	21.760.000,00	0,00	0%	3	3	100%
27	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	206.926.000,00	0,00	0%	4	4	100%
28	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	48.795.000,00	0,00	0%	5	5	100%
29	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Manajemen Keuangan	65.337.000,00	21.502.723,00	32,91%	3	3	100%
30	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Reformasi Kinerja	22.515.000,00	0,00	0%	12	12	100%
31	BBKK Denpasar	BBKK Denpasar	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	13.343.000,00	0,00	0%	11	11	100%
Jumlah				27.138.418.000	22.518.985.040	82,98%			

A.8. Realokasi Anggaran

*Refocusing/
Realokasi
Anggaran*

Pagu anggaran semula Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.138.418.000,00 , sedangkan pagu sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 masih adalah sebesar Rp25.538.163.000,00.

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode sampai dengan 31 Desember 2025, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar sudah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar mengalami Efisiensi terpusat / Pagu Blokir sehingga Pagu Efektif yang dapat dipergunakan adalah sebesar Rp 22.645.620.000,00. Adapun pagu anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Anggaran Awal, Anggaran setelah Revisi Terakhir dan Pagu Efektif

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	PAGU BLOKIR	PAGU EFEKTIF
Pendapatan				
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.500.000	6.500.000		6.500.000
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	80.795.000	80.795.000		80.795.000
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	689.865.000	689.865.000		689.865.000
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1.072.840.000	1.072.840.000		1.072.840.000
Jumlah Pendapatan	1.850.000.000	1.850.000.000	-	1.850.000.000
Belanja				
Belanja Pegawai	18.718.910.000	17.118.655.000	-	17.118.655.000
Belanja Barang	8.336.218.000	8.336.218.000	2.892.543.000	5.443.675.000
Belanja Modal	83.290.000	83.290.000	-	83.290.000
Jumlah Belanja	27.138.418.000	25.538.163.000	2.892.543.000	22.645.620.000

Berdasarkan jenis kegiatannya, pagu anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar tersaji pada tabel berikut,

Tabel 12
Anggaran berdasarkan Program TA 2025

PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	PAGU BLOKIR	PAGU EFEKTIF
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DO)	2.908.160.000	2.908.160.000	1.463.581.000	1.444.579.000
Program Dukungan Manajemen (WA)	24.230.258.000	22.630.003.000	1.428.962.000	21.201.041.000
Total Belanja	27.138.418.000	25.538.163.000	2.892.543.000	22.645.620.000

Dari total anggaran Rp25.538.163.000 terdapat alokasi anggaran untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp 2.908.160.000,00 atau sebesar 11,39% dan untuk Program Dukungan manajemen sebesar Rp 22.630.003.000,00 atau sebesar 88,6%.

B.1 PENDAPATAN

Realisasi

Pendapatan

Rp2.157.980.224,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.157.980.224,00 atau mencapai 116,6 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.850.000.000,00. Pendapatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.157.980.224,00.

Pendapatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar terdiri dari Jasa Kekarantinaan Kesehatan, Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 13**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025**

No	Uraian	per 31 Desember 2025		
		Estimasi	Realisasi	% Real Est.
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.500.000	-	-
3	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	80.795.000	80.265.000	99,34
4	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	689.865.000	1.330.580.000	192,88
5	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1.072.840.000	741.915.000	69,15
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.220.224	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah		1.850.000.000	2.157.980.224	116,65

Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 0,54 % dari tahun sebelumnya penurunan pendapatan tahun 2025 ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Yang Lalu.

Pendapatan Fungsional di Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar mengalami kenaikan, ini dipengaruhi oleh surat edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan HK.02.02/A/1206/2025 tanggal 25 April 2025 tentang kewajiban Jemaah Umroh untuk melakukan vaksinasi Meningitis dan Polio yang disesuaikan dengan aturan pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan Jemaah Umroh untuk melakukan vaksin meningitis dan polio.

Kenaikan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak BBKK Denpasar 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut: pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan dari Rp 76.145.002,00 meningkat menjadi 80.265.000,00, Jasa Kekarantina Kesehatan dari Rp 729.130.000,00 meningkat menjadi Rp 741.915.000,00

dan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan juga mengalami peningkatan dari Rp 1.144.255.000,00 meningkat menjadi Rp 1.330.580.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	91.720.314	(100)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	80.265.000	76.145.002	5
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	741.915.000	729.130.000	2
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1.330.580.000	1.144.255.000	16
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.220.224	22.285.065	(77)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	106.147.848	(100)
Jumlah	2.157.980.224	2.169.683.229	(0,54)

Realisasi pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 80.265.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan fasilitas kesehatan seperti Pemeriksaan dan Pengobatan, *Primary Health Certificate* (PHC)
2. Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan sebesar Rp741.915.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa karantina seperti *Certificate of Pratique* (COP), *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)/ *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC), *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)
3. Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar Rp 1.330.580.000,00 merupakan Pendapatan yang diperoleh jasa pemberian Vaksinasi seperti vaksin

Maningitis, Vaksin *Yellow Fever*, Vaksin Polio

4. Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Balai Besar Kekejarantinaa Kesehatan Denpasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.220.224,00 karena adanya pengembalian disebabkan oleh penyesuaian tunjangan pegawai atas pembayaran kekurangan kenaikan tunjangan Golongan/ kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional atas nama Gede Aris Prayoga senilai Rp 224,00,00 SPM-415871 404405524 dan Fuad Hudoman Thamrin senilai Rp 5.220.000,00 SPM-415871 466138944

B.2. BELANJA

Realisasi

Belanja

Rp22.517.534.316,00

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp22.517.534.314,00 atau 88,17 % dari anggaran belanja sebesar Rp.25.538.163.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

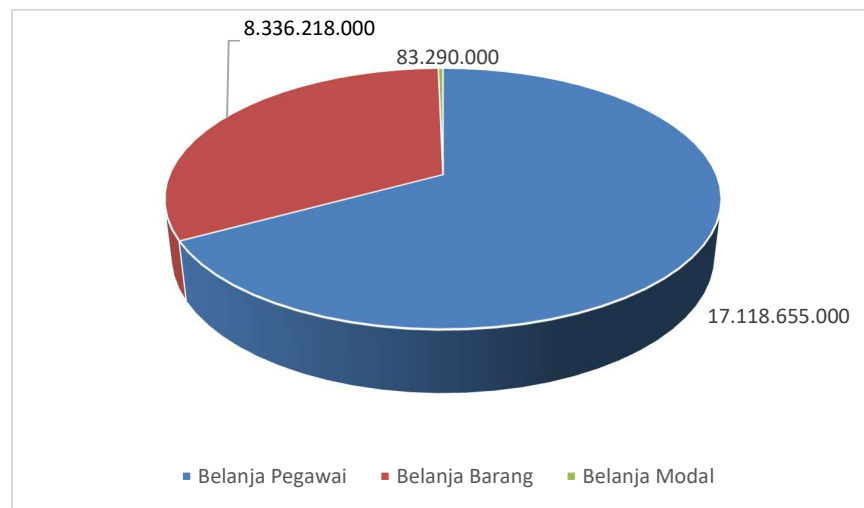
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	31 Desember 2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	17.118.655.000	16.993.813.070	99,27
Belanja Barang	8.336.218.000	5.440.505.946	65,26
Belanja Modal	83.290.000	83.215.300	99,91
Total Belanja Kotor	25.538.163.000	22.517.534.316	88,17
Pengembalian Belanja	0	-	0
Total Belanja	25.538.163.000	22.517.534.316	88,17

Komposisi anggaran per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 1

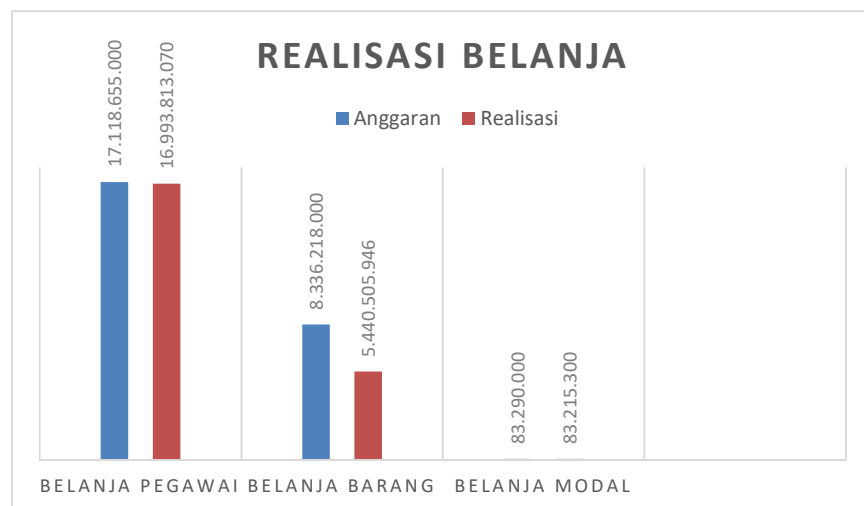
Komposisi Anggaran per-Jenis Belanja Audited TA 2025



Komposisi anggaran dan realisasi per jenis belanja, dapat dilihat dalam grafik berikut,

Grafik 2

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Audited TA 2025



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Belanja Berdasarkan Program / Kegiatan TA 2025

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI NETO
DO - PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2.908.160.000	1.443.296.738
Sub Total	2.908.160.000	1.443.296.738
WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	22.630.003.000	21.074.237.578
Sub Total	22.630.003.000	21.074.237.578
Total	25.538.163.000	22.517.534.316

Dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya, Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 12,10 % persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 22.517.534.316,00 dan Rp 25.636.440.251. Perbandingan realisasi belanja disajikan sebagai berikut:

Tabel 17

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI NETO 31 DES 2025	REALISASI NETO 31 DES 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.993.813.070	16.882.602.962	0,66
Belanja Barang	5.440.505.946	8.148.066.039	(33,23)
Belanja Modal	83.215.300	605.771.250	(86,26)
Jumlah	22.517.534.316	25.636.440.251	(12,17)

Penurunan realisasi anggaran Tahun 2025 juga disebabkan oleh efisiensi anggaran terpusat tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mengakibatkan adanya anggaran blokir di

satuan kerja. Jika realisasi anggaran tahun 2025 dilihat dari sisi anggaran efektif yang dapat dipergunakan satker maka realisasi anggarannya adalah sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran Tahun 2025	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Sesuai Pagu Efektif	Persentase (%)
Belanja Pegawai	17.118.655.000	-	17.118.655.000	16.993.813.070	99,27
Belanja Barang	8.336.218.000	2.892.543.000	5.443.675.000	5.440.505.946	99,94
Belanja Modal	83.290.000	-	83.290.000	83.215.300	99,91
Jumlah	25.538.163.000	2.892.543.000	22.645.620.000	22.517.534.316	99,43

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp16.993.813.070,00

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 16.993.813.070,00 dan Rp 16.882.602.962,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.481.949.278	8.017.297.625	(6,68)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.158.197.308	637.012.131	81,82
Belanja Lembur	3.274.000	2.152.000	-
Belanja Tunjangan Khusus/Kinerja	8.351.843.208	8.226.141.206	1,53
Jumlah Belanja Kotor	16.995.263.794	16.882.602.962	0,67
Pengembalian Belanja Pegawai	1.450.724	337.920	329,31
Jumlah Belanja	16.993.813.070	16.882.265.042	0,66

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami Peningkatan sebesar 0,66% dari TA 2024. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar sebanyak 33 orang yang terdiri dari 7 orang dengan Jabatan Fungsional dan 26 orang dengan jabatan Operator Layanan Operasional sehingga seluruh komponen belanja pegawai PPPK terjadi peningkatan cukup signifikan. Sedangkan pada Gaji dan Tunjangan PNS mengalami penurunan dari Tahun 2024 ini disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas sebanyak 5 orang dan adanya pegawai yang pindah dari satker BBKK Denpasar sebanyak 2 orang.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp
5.440.505.946,0
0

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 5.440.505.946,00 dan Rp 8.148.066.039,00 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 31,93% dari Realisasi TA 2024.

Komponen belanja barang yang mengalami penurunan realisasi disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan penurunan belanja barang.

Berikut ini perbandingan realisasi belanja barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024,

Tabel 19
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.722.263.876	2.022.131.736	(14,83)
Belanja Barang Non Operasional	188.834.720	640.645.679	(70,52)
Belanja Barang Persediaan	320.419.438	403.153.850	(20,52)
Belanja Jasa	1.393.510.283	1.761.777.064	(20,90)
Belanja Pemeliharaan	1.010.910.156	1.583.382.844	(36,16)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	804.567.473	1.736.974.866	(53,68)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.440.505.946	8.148.066.039	(33,23)
Pengembalian Belanja	285.000	-	-
Jumlah Belanja	5.440.790.946	8.148.066.039	(33,23)

Belanja barang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 33,23% ini terjadi akibat adanya efisiensi anggaran terpusat pada tahun 2025 dari pagu anggaran belanja barang pada tahun 2025 dengan besaran Rp 8.336.218.000 mengalami efisiensi anggaran/ pagu blokir sebesar Rp 2.892.543.000,00 sehingga anggaran dapat dimanfaatkan oleh Satker BBKK Denpasar hanya sebesar Rp 5.443.675.000,00 atau sebesar 65.30% Pengembalian belanja barang sebesar Rp 285.000,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pemotongan pajak atas pembayaran sewa rumah dinas Kepala Balai.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal Rp
83.215.300,00*

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 83.215.300,00 dan Rp 605.771.250,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 86,26% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh penurunan belanja modal secara signifikan terjadi karena anggaran belanja modal TA 2025 lebih rendah dibandingkan TA 2024 hal ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja Modal dari tahun 2024 ke 2025.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.215.300	605.771.250	(86,26)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	83.215.300	605.771.250	(86,26)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 83.215.300,00 dan Rp 605.771.250,00, belanja ini mengalami penurunan sebesar 86,26% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.215.300	605.771.250	(86,26)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	83.215.300	605.771.250	(86,26)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	83.215.300	605.771.250	(86,26)

Adapun belanja modal peralatan mesin yang telah diadakan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Barang	Unit	Harga Per Unit	Jumlah
Tandu Lipat	1	1.545.000	Rp1.545.000
Alat Kantor Lainnya	5	1.000.000	Rp5.000.000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	2	7.500.000	Rp15.000.000
Defibrilator	2	20.800.000	Rp41.600.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	9.000.000	Rp9.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.600.000	Rp3.600.000
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	7.470.300	Rp7.470.300
Jumlah Belanja	11	39.845.000	83.215.300

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,0% dibandingkan Realisasi TA 2024. Pada Tahun 2025 tidak terdapat penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan

sebesar 0 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Tabel 23

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2025 dan Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp
469.001.791,00

Jumlah Aset Lancar Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 469.001.791,00 dan Rp 739.849.638,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

KETERANGAN	31 Desember 2025	Desember 2024
Kas dalam Rekening Mandiri	-	-
Kas di brankas	-	-
Kas yang sudah bentuk kuitansi	-	-
Jumlah	-	-

C.1.3 Piutang bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 425.450.199,00 dan Rp 425.450.199,00 Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Perbandingan Piutang bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 2024

KETERANGAN	31 Desember 2025	2024
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	425.450.199	425.450.199
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	425.450.199	425.450.199

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 sebesar Rp 425.450.199,00 seluruhnya merupakan Piutang Negara Bukan Pajak atas penyeberangan kapal di Wilker Gilimanuk Menuju Ketapang

Tabel 26
Posisi Piutang Bukan Pajak yang telah diserahkan ke DJKN
Per 31 Desember 2025

DEBITUR	TAHAP PENGURUSAN	NOMOR PENGURUSAN	TANGGAL PENGURUSAN	NOMOR PENYERAHAN	TANGGAL PENYERAHA	NOMOR SP3N	TANGGAL SP3N	SALDO
PT. MAHAR MUFID DAROIN	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-200/PUPNC.20/2017	17-OCT-17	KU.01.01/WI.2/2604/2016	25-JUL-16	SP3N-336/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	8.630.000
PT. SARANA SAMUDRA UTAMA	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-198/PUPNC.20/2017	17-OCT-17	KU.01.01/WI.2/2601/2016	25-JUL-16	SP3N-333/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	5.080.000
PT. SABRANI	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-1999/PUPNC.20/2017	17-OCT-17	KU.01.01/WI.2/2603/2016	25-JUL-16	SP3N-335/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	10.870.000
PT. GERBANG SAMUDRA SARANA	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-202/PUPNC.20/2017	17-OCT-17	KU.01.01/WI.2/2621/2016	25-JUL-16	SP3N-352/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	5.820.000
PT PELAYARAN BANYUWANGI SEJATI	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-01/PUPNC.20/2018	12-FEB-18	KU.01.01/WI.2/2599/2019	25-JUL-16	SP3N-332/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	11.320.000
PT. HERLIN SAMUDRA LINE	Surat Paksa (Formulir 9)	SP-02/PUPNC.20/2018	12-FEB-18	KU.01.01/WI.2/2620/2016	18-JUL-16	SP3N-351/PUPNC.20.01/2016	05-SEP-16	10.770.000
PT PELAYARAN BANYUWANGI SEJATI	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2134/WKN.14/KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/I/394/2018	27-FEB-18	SP3N-150/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	8.050.000

DEBITUR	TAHAP PENGURUSAN	NOMOR PENGURUSAN	TANGGAL PENGURUSA	NOMOR PENYERAHAN	TANGGAL PENYERAHA	NOMOR SP3N	TANGGAL SP3N	SALDO
PT MAHAR MUFID DAROIN	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2136/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/391/2018	27-FEB-18	SP3N-152/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	8.500.000
PT JEMBATAN NUSANTARA	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2140/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.02/1/398/2018	27-FEB-18	SP3N-156/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	86.480.000
PT INDONESIA FERRY	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2141/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/397/2018	27-FEB-18	SP3N-157/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	23.840.000
PT JEMBATAN NUSANTARA	Surat Paksa	SP-76/PUPNC.20.00/2025	27-MAY-25	KU.01.01/1/1406/2019	24-JUN-19	SP3N-2511/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	1.563.278
PT. INDONESIA FERRY	Surat Paksa	SP-77/PUPNC.20.00/2025	27-MAY-25	KU.01.01/1/1407/2019	24-JUN-19	SP3N-2512/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	30.899.880
PT PRIMA EKSEKUTIF	Panggilan (Bab 06 - Form 06.01)	S-6097/WKN.14 /KNL.01/2019	11-JUL-19	KU.01.01/1/1408/2019	24-JUN-19	SP3N-2513/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	314.433
PT GERBANG SAMUDRA SARANA	Panggilan (Bab 06 - Form 06.01)	S-6099/WKN.14 /KNL.01/2019	11-JUL-19	KU.01.01/1/1410/2019	24-JUN-19	SP3N-2515/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	43.540.000
PT ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	Panggilan (Bab 06 - Form 06.01)	S-6100/WKN.14 /KNL.01/2019	11-JUL-19	KU.01.01/1/1411/2019	24-JUN-19	SP3N-2516/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	21.666.330
PT. SARANA SAMUDRA UTAMA	Panggilan (Bab 06 - Form 06.01)	S-6101/WKN.14 /KNL.01/2019	11-JUL-19	KU.01.01/1/1412/2019	24-JUN-19	SP3N-2517/PUPNC.20.01/2019	09-JUL-19	10.117.890
PT. Atosim Lampung Pelayaran	Surat Paksa	SP-75/PUPNC.20.00/2025	27-MAY-25	KU.01.01/1/0337/2020	24-FEB-20	SP3N-501/PUPNC.20.01/2020	11-MAR-20	1.945.548
PT. Sarana Samudra Utama	Surat Paksa	SP-78/PUPNC.20.00/2025	27-MAY-25	KU.01.01/1/0338/2020	24-FEB-20	SP3N-502/PUPNC.20.01/2020	11-MAR-20	5.462.100
PT Tri Mitra Samudra	Panggilan (Bab 06 - Form 06.01)	S-1386/WKN.14 /KNL.01/2018	09-APR-18	KU.01.03/1/406/2018	27-FEB-18	SP3N-139/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	750.000
PT Dharma Bahari Utama	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2014/WKN.14 /KNL.01/2018	06-JUL-18	KU.01.03/1/386/2018	27-FEB-18	SP3N-140/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	270.000
PT Duta Permaisuri Bahari	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2015/WKN.14 /KNL.01/2018	06-JUL-18	KU.01.03/1/408/2018	27-FEB-18	SP3N-141/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	3.630.000
PT Sarana Samudra Utama	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2126/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/400/2018	27-FEB-18	SP3N-142/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	25.550.000
PT Atosin Lampung Pelayaran	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2127/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/389/2018	27-FEB-18	SP3N-143/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	20.620.000
PT Bahtera Ferry Sentosa	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2129/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/405/2018	27-FEB-18	SP3N-145/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	5.880.000
PT Sabrani	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2130/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/390/2018	27-FEB-18	SP3N-146/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	21.640.000
PT Herlin Samudra Line	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2131/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/403/2018	27-FEB-18	SP3N-147/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	24.120.000
PT Gerbang Samudra Sarana	Panggilan Terakhir (Bab 06 - Form 06.02)	S-2133/WKN.14 /KNL.01/2018	11-JUL-18	KU.01.03/1/387/2018	27-FEB-18	SP3N-149/PUPNC.20.01/2018	28-MAR-18	28.120.000

Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kepala Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Denpasar dan Nota Dinas No ND-862/KNL.1401/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 tentang Permintaan Bantuan Penyampaian Surat Paksa dan Penelitian Lapangan Terhadap Penanganan Piutang BBKK Denpasar kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengingat adanya penanggung utang yang beralamat di Wilayah Kerja KPKNL Jember Sehingga saat ini proses penanganan piutang BBKK Denpasar sedang berproses di KPKNL Jember.

C.1.4 *Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 425.450.199,00 dan Rp 425.450.199,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025

KETERANGAN	Nilai Piutang Jangka pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0.5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet	425.450.199	100%	425.450.199
	-	-	-
Jumlah	425.450.199		425.450.199

Persediaan

C.1.4 Persediaan

Rp

469.001.79

1,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 469.001.791,00 dan Rp 739.849.638,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

. Tabel 28

Perbandingan Saldo Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

JENIS	31 Desember 2025	2024
Barang Konsumsi	36.397.300	115.115.254
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	432.604.491	624.734.384
Jumlah	469.001.791	739.849.638

Mutasi atas Persediaan per 31 Desember 2025 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 29
Mutasi Persediaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	739.849.638
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	320.419.438
Transfer Masuk	Rp	662.796.185
Opname Fisik	Rp	148.724.554
Reklasifikasi dari Aset	Rp	5.000.000
Reklasifikasi masuk	Rp	2.407.923
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	(15.495.600)
Habis Pakai	Rp	(1.394.700.347)
Saldo per 30 Juni 2024	Rp	469.001.791

Aset Tetap
Rp
65.690.816.188,00

C.2. Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 65,690.816.188,00 dan Rp 67.824.156.776,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Tanah
Rp41.278.131.000

C.2.1 Tanah
Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp41.278.131.000,00 dan Rp41.278.131.000,00 Nilai Tanah tersebut Tidak terdapat penambahan nilai tanah pada tahun 2025 ini. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 30
Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	41.278.131.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi keluar	Rp	-
Likuidasi Keluar	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	Rp	41.278.131.000

Aset Tanah di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar tersebar di beberapa daerah sebagai berikut:

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.500 M2	Tanah Gedung Diklat di Perumahan Puri Gading Jimbaran Badung	7.846.875.000
2	500 M2	Tanah Kantor Wilker Padangbai di Kab. Karangasem	611.813.000
3	2200 M2	Tanah Kantor Induk di Jln. Pulau Moyo No 46 Denpasar	12.685.443.000
4	600 M2	Tanah Kantor Wilker Celukan Bawang di Kab.Buleleng	2.073.000.000
5	1970 M2	Tanah Kantor Bandara Ngurah Rai di Kab. Badung	18.061.000.000
Jumlah			41.278.131.000

Peralatan
dan Mesin
Rp
29.199.016.
984,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 29.199.016.984,00 dan Rp 33.428.431.309,00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	33.428.431.309
Mutasi tambah:		
Pencatatan Saldo Awal	Rp	-
Pembelian	Rp	83.215.300
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Aset ke Persediaan	Rp	(5.000.000)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(4.307.629.625)
Saldo per 31 Des 2025	Rp	29.199.016.984
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2025	Rp	(26.315.437.814)
Nilai Buku per 31 Des 2025	Rp	2.883.579.170

Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin adalah:

1. Transaksi pencatatan saldo awal sebesar Rp 33.428.431.309,00
2. Transaksi pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp 83.215.300,00 adalah pembelian peralatan dan mesin sebagai berikut:

Nama Barang	Unit	Harga per Unit	Jumlah
Tandu Lipat	1	Rp1.545.000	Rp1.545.000
Alat Kantor Lainnya	5	Rp1.000.000	Rp5.000.000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	2	Rp7.500.000	Rp15.000.000
Defibrilator	2	Rp20.800.000	Rp41.600.000
Printer (peralatan Personal Komputer)	1	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Printer (peralatan Personal Komputer)	1	Rp3.600.000	Rp3.600.000
Autoclave (Alat Laboratorium)	1	Rp7.470.300	Rp7.470.300
Jumlah	13	Rp50.915.300	Rp83.215.300

3. Tansaksi reklasifikasi Aset ke persediaan senilai Rp 5.000.000,00 merupakan pembelian Test Kit Rhodamin-B pada Semester 1 merupakan transaksi pembeliannya menggunakan akun belanja modal dan dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena Test Kit Rhodamin-B adalah bahan habis pakai maka perlu dilakukan reklasifikasi dari peralatan dan mesin menjadi persediaan.

4. Transaksi Aset dari penggunaan adalah Aset yang telah rusak berat dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi senilai Rp 4.307.629.625,00

*Gedung
dan
Bangunan
Rp25.369.0
09.295*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 25.369.009.295 dan Rp 25.369.009.295. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Tabel 32
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2024	Rp	25.369.009.295
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan melalui KDP	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2025	Rp	25.369.009.295
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	Rp	(3.839.903.277)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp	21.529.106.018

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0,00*

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(30.155,341.
091,0)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp 30.155.341.091,00 dan Rp32.251.414.828,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	29.199.016.984	(26.315.437.814)	2.883.579.170
2	Gedung dan Bangunan	25.369.009.295	(3.839.903.277)	21.529.106.018
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		54.568.026.279	(30.155.341.091)	24.412.685.188

Aset Lain-Lain
Rp
4.490.129.625,0
0

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar serta dalam proses

penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 4.490.129.625,00 dan Rp10.616.417.083,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut

Tabel 34
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	10.616.417.083
Mutasi tambah:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	4.307.629.625
Mutasi kurang:		
Pencatatan Barang Yang Dihapuskan	Rp	(10.433.917.083)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	4.490.129.625
Akumulasi Penyusutan dan amortisasi s.d. 31 Desember 2025	Rp	(4.444.410.875)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	45.718.750

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(4.444.410.875)

C.3.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 4.444.410.875,00 dan Rp10.426.182.021,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah

dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Lain-lain	4.490.129.625	(4.444.410.875)	45.718.750
	Total	4.490.129.625	(4.444.410.875)	45.718.750

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp
44.959.784,00*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Balai Besar Kekarantina Kesehatan Denpasar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 44.959.784,00 dan Rp 1.216.000,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
44.959.784,00*

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan

pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 44.959.784,00 dan Rp 1.216.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Tabel 36

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	44.357.000	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	602.784	1.216.000
		-
Jumlah	44.959.784	1.216.000

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp 44.357.000,00 merupakan perhitungan jumlah uang makan dari 139 pegawai dari tgl 16 sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dibayarkan di tahun 2025 dan telah dibayarkan pada bulan Januari 2026
2. Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp 602.782,00 adalah jumlah transaksi pembayaran Air bulan Desember 2025 yang belum keluar tagihannya sehingga dibayarkan pada Januari 2026

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
0,00*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing –masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan

transaksi atas pengakuan utang karena BAST dari Pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihan pertanggal pelaporan adalah utang atas kerjasama tenaga Outsorsing.

Ekuitas

Rp

66.160.576.945,
00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.160.576.945,00 dan Rp 68.753.025.476,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP Rp 2.152.760.000,00 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 2.152.760.000,00 dan Rp 1.949.530.000,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 34,81. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 37
Perbandingan Rincian Pendapatan-LO s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

No	JENIS PENDAPATAN	31 DES 2025	31 DES 2024	%
1	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	80.265.000	76.145.002	5,41
2	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	741.915.000	729.130.000	1,75
3	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin	1.330.580.000	1.144.255.000	16,28
4	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
5	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah		2.152.760.000	1.949.530.002	10,42

Berdasarkan data tersebut, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak periode sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan tahun 2025 ini salah satunya disebabkan adanya surat edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan HK.02.02/A/1206/2025 tanggal 25 April 2025 tentang kewajiban Jemaah Umroh untuk melakukan vaksinasi Meningitis dan Polio sesuai dengan aturan pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan Jemaah umroh untuk melakukan vaksin meningitis dan polio.

Kenaikan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak BBKK Denpasar 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan dari

Rp 76.145.002,00 meningkat menjadi Rp 80.265.000,00, Jasa Kekarantinaan Kesehatan dari Rp 729.130.000,00 meningkat menjadi Rp 741.915.000,00 dan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan juga mengalami peningkatan dari Rp 1.144.255.000,00 menjadi Rp 1.330.580.000,00 Kebijakan Pemerintah terkait pemberian vaksinasi Jemaah Umroh cukup mempengaruhi peningkatan jumlah PNPB BBKK Denpasar. Adapun rincian dari pendapatan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 80.265.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan fasilitas kesehatan seperti Pemeriksaan dan Pengobatan, *Primary Health Certificate* (PHC)
2. Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan sebesar Rp 741.915.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa karantina seperti *Certificate of Pratique* (COP), *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)/ *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC), *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC)
3. Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar Rp 1.330.580.000,00 merupakan Pendapatan yang diperoleh jasa pemberian Vaksinasi seperti vaksin Meningitis, Vaksin *Yellow Fever*, Vaksin Polio

D.2 Beban Pegawai

Beban

Pegawai Rp

17.038.170.07

0,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 17.038.170.070,00 dan Rp16.817.333.962,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.219.356.700	5.527.160.350	(5,57)
Beban Pembulatan Gaji PNS	67.596	78.663	(14,07)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	393.745.310	409.078.905	(3,75)
Beban Tunj. Anak PNS	109.910.900	109.466.440	0,41
Beban Tunj. Struktural PNS	28.890.000	27.810.000	3,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	663.120.000	720.150.000	(7,92)
Beban Tunj. PPh PNS	59.705.268	66.465.587	(10,17)
Beban Tunj. Beras PNS	268.605.780	279.106.680	(3,76)
Beban Uang Makan PNS	751.282.000	793.542.000	(5,33)
Beban Tunjangan Umum PNS	14.940.000	22.215.000	(32,75)
Beban Gaji Pokok PPPK	807.281.137	442.705.800	82,35
Beban Pembulatan Gaji PPPK	14.585	9.703	50,31
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	49.067.708	22.030.640	122,72
Beban Tunjangan Anak PPPK	15.975.296	8.354.848	91,21
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	60.428.332	39.660.000	52,37
Beban Tunjangan Beras PPPK	52.806.250	26.578.140	98,68
Beban Uang Makan PPPK	174.341.000	93.173.000	87,12
Beban Tunjangan Umum PPPK	13.515.000	1.455.000	828,87
Beban Uang Lembur	3.274.000	2.152.000	52,14
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.324.955.825	7.671.177.119	(4,51)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK)	1.026.887.383	554.964.087	85,04
Jumlah	17.038.170.070	16.817.333.962	1,31

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,31% persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan signifikan pada belanja PPPK karena adanya penambahan PPPK sebanyak 33 orang pada akhir tahun 2025 yang terdiri dari 7 orang dengan Jabatan Fungsional dan 26 orang dengan jabatan Operator Layanan Operasional sehingga terjadi peningkatan yang cukup

signifikan pada pembayaran belanja pegawai PPPK, sedangkan Gaji dan Tunjangan PNS mengalami penurunan dari tahun lalu disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun sebanyak 5 orang dan adanya pegawai yang pindah keluar dari satker BBKK Denpasar sebanyak 2 orang.

D.3 Beban Persediaan

Beban

Persediaan Rp

1.245.975.793

,00

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.245.975.793,00 dan Rp 1.305.715.155,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,35 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena Penurunan pemanfaatan persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	515.804.196	954.169.683	(45,94)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	730.171.597	351.545.472	107,70
Jumlah	1.245.975.793	1.305.715.155	(4,58)

*Beban Barang
dan Jasa*

*Rp3.303.995.66
3,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.303.995.973,00 dan Rp4.424.504.404.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 25,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh belanja barang dan jasa pada 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya Efisienasi Anggaran sehingga pemanfaatan barang jasa menjadi terbatas. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 40
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.238.139.783	1.666.217.737	(25,69)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115.600.000	85.536.000	35,15
Beban Barang Operasional Lainnya	368.524.093	270.377.999	36,30
Beban Bahan	161.934.720	584.125.679	(72,28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	26.900.000	56.520.000	(52,41)
Beban Langganan Listrik	271.189.044	367.198.086	(26,15)
Beban Langganan Telepon	38.056.134	44.684.108	(14,83)
Beban Langganan Air	28.993.337	23.901.096	21,31
Beban Jasa Pos dan Giro	3.761.364	4.583.600	(17,94)
Beban Sewa	131.250.000	149.250.000	(12,06)
Beban Jasa Profesi	3.500.000	29.500.000	(88,14)
Belanja Jasa Lainnya	916.147.188	1.142.610.099	-
	3.303.995.663	4.424.504.404	(25,33)

Beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sekitar 25,33 persen dibandingkan beban barang dan jasa pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi barang dan jasa secara umum disebabkan karena Efisiensi Anggaran akun belanja barang dan jasa tidak dapat direalisasikan karena mengalami pagu blokir sehingga mempengaruhi pemanfaatan barang dan jasa secara keseluruhan.

Beban honor operasional satuan kerja mengalami peningkatan karena adanya penyesuaian standar biaya masukan atas pemberian honorarium di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar yang disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan tahun 2025.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp

1.010.910.156,0

0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.010.910.156,00 dan Rp 1.583.382.844,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 41

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	479.729.484,00	878.692.064,00	(45,40)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	531.180.672,00	704.690.780,00	(24,62)
Jumlah	1.010.910.156	1.583.382.844	(36,16)

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 36,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga pemeliharaan

yang dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada setelah dilakukan efisiensi. .

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
804.567.473,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 804.567.473,00 dan Rp 1.736.974.866,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 53,68 persen. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	362.754.473	673.461.866	(46,14)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	427.283.000	934.819.000	(54,29)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	118.794.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.530.000	9.900.000	46,77
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	804.567.473	1.736.974.866	(53,68)

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 53,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya efisiensi anggaran baik Beban

perjalanan Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota mengalami efisiensi anggaran

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada masyarakat

<i>Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0</i>	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang riset dan penelitian kesehatan.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 2.166.337.138,00</i>	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.166.337.138,00 dan Rp 3.370.090.625,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut
--	--

.

Tabel 43
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.642.089.021	2.750.633.160	(40,30)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	524.248.117	542.386.193	(3,34)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan lagi	-	77.071.272	(100,00)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.166.337.138	3.370.090.625	(35,72)

D.9 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
5.220.224*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Nilai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp 5.220.224,00 dan Rp 167.387.379,00 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan pelepasan aset non lancar	-	91.720.314	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	-
Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar	-	91.720.314	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.220.224	75.667.065	(93,10)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Tahun yang lalu	-	-	-
Surplus/Defisit keg. Non Ops Lainnya	5.220.224	75.667.065	(93,10)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.220.224	167.387.379	(96,88)

- Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang lalu senilai Rp 5.220.224,00 adalah penerimaan karena disebabkan oleh penyesuaian tunjangan pegawai atas pembayaran kekurangan kenaikan

tunjangan Golongan/ kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional atas nama Gede Aris Prayoga senilai Rp 224,00,00 dan Fuad Hudaman Thamrin senilai Rp 5.220.000,00

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak terdapat catatan penting lainnya Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.753.025.476,00 dan Rp.70.945.707.769,00

E.2 Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.23.411.976.069,00 dan Rp.27.189.349.475,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

E.4 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.189.735.062,00 dan Rp.0,00 ini merupakan nilai koreksi atas penghapusan asset lainnya dan koreksi atas Reagen Kit yang di reklas ke Persediaan

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.21.009.262.600,00 dan Rp.24.996.667.182,00. Transaksi Antar Entitas adalah

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Tabel 45

Rincian Transaksi Antar Entitas

Yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Selisih DKEL dan DDEL		
Ditagihkan Ke Entitas Lain	22.517.534.316	25.636.440.251
Diterima Dari Entitas Lain	(2.157.980.224)	(2.169.683.229)
Sub Jumlah	20.359.554.092	23.466.757.022
Selisih TM dan TK		
Transfer Masuk	665.204.108	1.530.950.160
Transfer Keluar	(15.495.600)	(1.040.000)
Sub Jumlah	649.708.508	1.529.910.160
Transaksi Antar Entitas	21.009.262.600	24.996.667.182

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 2.157.980.224,00, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 2.169.683.229,00

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp 665.204.108,00 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 45
Transfer Masuk per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31
Desember 2025

No	SATKER	JENIS PERSEDIAAN	Nilai
1	Balai Kekarantinaan Kesehatan Medan	Buku ICV (Sertifikat Vaksinasi Internasional)	4.001.550
2	Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo	Buku ICV (Sertifikat Vaksinasi Internasional)	5.716.500
3	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Buku Kesehatan Kapal	11.950.000
4	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Emergency Kit	3.187.920
5	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Meningitis Meningokokus	125.340.000
6	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Buku ICV (Sertifikat Vaksinasi Internasional)	5.716.500
7	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Yellow Fever	13.946.040
8	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Poliomyelitis Inaktif (IPV)	19.112.200
9	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Racun Tikus	1.869.000
10	Kantor Pusat Ditejn Farmasi dan Alat Kesehatan	Blood Lancet (Nousmed)	139.743
11	Kantor Pusat Ditejn Farmasi dan Alat Kesehatan	Alcohol Swab (Meddis)	150.840
12	Kantor Pusat Ditejn Farmasi dan Alat Kesehatan	Gluko Test Strip (Prufen)	2.117.340
13	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Buku ICV (Sertifikat Vaksinasi Internasional)	17.850.000
14	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Poliomyelitis Inaktif (IPV)	19.685.566
15	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Label Vinyl	155.000
16	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Parafilm	975.000
17	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Medical Surgical Mask Tie On	455.000
18	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Wooden Tongue Depressor	23.229
19	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Wooden Tongue Depressor (Onemed)	680.000
20	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Biohazard Disposable Bag	390.000
21	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Surgical Gown Disposable Uk. L	1.597.413
22	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Virus Transport Media (LAKEbio)	1.585.000
23	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Specimen Carrier + Ice Pack (Infitek)	2.030.378
24	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Sample Container - 550ml	70.000
25	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Thick Aluminium Foil	86.000
26	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Plastic Ziplock Specimen	460.000
27	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	RDT-Ag COVID 19	2.800.000
28	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Handscoon Uk. M	500.000
29	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Handscoon Uk. L	500.000
30	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	VTM LAKEbio	1.585.000
31	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Poliomyelitis Inaktif (IPV)	11.085.076
32	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Meningitis Meningokokus	29.398.500
33	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Vaksin Yellow Fever	333.100.922
34	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Gown Disposable & Hair Cap	2.226.220
35	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Nitrile Gloves M	107.215
36	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Nitrile Gloves L	123.702
37	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Plastik Biohazard	1.113.105
38	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Masker Medis Earloop	181.680
39	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Virus Transport Medium	1.324.520

40	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Tongue Spatel Steril	143.096
41	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	RDT-Ag COVID-19	3.088.680
42	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Masker N-95	2.212.205
43	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Parafilm M Roll	772.072
44	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Plastik Klip/Zip	255.497
45	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Sample Container	181.262
46	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Cooler Box 8L	2.643.244
47	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Aluminium Foil.	148.288
48	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Label Stiker Vinyl	46.667
49	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	UN Fiberboard Box	876.904
50	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Plastic Wrap	445.046
51	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Tissue Towel	57.567
52	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Seal-R-Film laboratory	1.285.443
53	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Gown L	3.190.144
54	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Gown XL	3.289.144
55	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Six Respiratory Pathogens Nu	22.500.000
56	K. Pusat Dit. Jen. Penanggulangan Penyakit	Biohazard Disp Bag	732.690
JUMLAH			665.204.108

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp -15.495.600,00 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 46

Transfer Keluar per Satker untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

No	NAMA SATKER	JENIS PERSEDIAAN	NILAI
1	LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO	Vaksin Yellow Fever	15.495.600
JUMLAH			15.495.600

Trasnaksi Transfer Keluar dan masuk Sesuai Aplikasi selengkapnya terdapat pada lampiran.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung adalah pengesahan pendapatan hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung adalah pengesahan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung adalah sebesar Rp0.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
Rp66.160.576.94 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.66.160.576.945,00
5,00 dan Rp.68.753.025.476,00.

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya

F.1. Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025 terdapat hasil diskusi yang menyarankan bahwa terdapat asset dalam kondisi rusak berat namun masih dicatat dalam asset tetap sehingga harus disesuaikan ke Aset yang tidak dipergunakan lagi senilai Rp 4.307.629.625,-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Terdapat transaksi resiprokal berupa belanja belanja pemeriksaan sampel leptospirosis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta pada tanggal 6 November 2025 dengan Referensi Nomor SP2D 259991320629142/ NTPN 140F41JNG8U8K1GR dengan jumlah transaksi senilai Rp 7.500.000,00

LAMPIRAN

Lampiran-lampiran untuk mendukung Catatan atas Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar tahun 2025:

1. Neraca Percobaan Kas
2. Neraca Percobaan Akrua (Saldo Awal)
3. Neraca Percobaan Akrua
4. Neraca
5. Laporan Realisasi Anggaran
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Akun
8. Laporan Operasional
9. Laporan Perubahan Ekuitas
10. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
11. Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel)
13. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
14. Risalah Lelang
15. Distribusi Alokasi Anggaran TA 2025
16. Daftar Transfer Masuk
17. Daftar Transfer Keluar
18. Daftar Beban Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
19. Daftar Persediaan Usang dan Rusak
20. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar nomor HK.02.02/I/40/2024 tentang UAPPA/B Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar TA 2024